

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS**



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2024**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wilayah kerja KPP Pratama Kudus adalah Kabupaten Kudus, dengan data sebagai berikut :
  - a) Terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 123 Desa
  - b) Luas wilayah 425,15 km<sup>2</sup>
  - c) Jumlah Penduduk 874,8 ribu jiwa
  - d) Batas administrasi wilayah Kabupaten Kudus :
    - Utara : Kab. Jepara
    - Selatan : Kab. Grobogan dan Kab. Demak
    - Timur : Kab. Pati
    - Barat : Kab. Demak
  - e) PDB tahun 2023 sebesar Rp. 121,31 T, nomor 3 terbesar setelah Kota Semarang (Rp. 248,90 T) dan Kab. Cilacap (Rp. 132,42 T)
  - f) Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Kudus, yaitu :
    - industri pengolahan 78,10%
    - perdagangan 5,86%
    - konstruksi 3,64%, dan
    - pertanian 2,48%
  - g) Jumlah Wajib Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Jenis WP            | Efektif | Non Efektif | Jumlah  | Setor | Tidak Setor | Jumlah  |
|----|---------------------|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| 1  | OP Karyawan         | 14.419  | 72.352      | 86.771  | 952   | 85.819      | 86.771  |
| 2  | OP Non Karyawan     | 27.488  | 77.697      | 105.185 | 229   | 104.956     | 105.185 |
| 3  | Badan               | 4.548   | 2.762       | 7.310   | 834   | 6.476       | 7.310   |
| 4  | Instansi Pemerintah | 231     |             | 231     | 49    | 182         | 231     |
|    | Jumlah              | 46.686  | 152.811     | 2.064   | 2.064 | 197.433     | 199.497 |

3. Sumber daya manusia di KPP Pratama Kudus per 31 Desember 2024 berjumlah 94 orang, sebagai berikut :

| No | Jabatan                       | Pendidikan |    |    | Jumlah |
|----|-------------------------------|------------|----|----|--------|
|    |                               | < S1       | S1 | S2 |        |
| 1  | Pejabat Administrator         | -          | -  | 1  | 1      |
| 2  | Pejabat Pengawas              | -          | 4  | 6  | 10     |
| 3  | Fungsional Pemeriksa Pajak    | 3          | 6  | -  | 9      |
| 4  | Fungsional Penyuluh Pajak     | -          | 3  | 1  | 4      |
| 5  | Fungsional Penilai Pajak      | 1          | -  | -  | 1      |
| 6  | <i>Account Representative</i> | 9          | 26 | 2  | 37     |
| 7  | Pelaksana                     | 20         | 9  | 1  | 30     |
| 8  | Jurusita Pajak Negara         | -          | 2  | -  | 2      |
|    | JUMLAH                        | 33         | 50 | 11 | 94     |

4. Permasalahan utama dalam pencapaian kinerja tahun 2024 adalah *tax gap* antara target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2024. Beberapa tindakan yang diambil adalah :

a. Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) :

- 1) Pengawasan pembayaran dan penyetoran perpajakan
- 2) pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang jatuh temponya di tahun 2024;
- 3) pengawasan pembayaran dan kepatuhan atas Instansi Pemerintah Daerah
- 4) pengawasan pembayaran dan kepatuhan atas Dana Desa
- 5) Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25

b. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan :

- 1) Menindaklanjuti SP2DK DPP dengan kunjungan (*visit*) dan konseling/usul pemeriksaan
- 2) Mengumpulkan data lengkap sebagai bahan untuk diusulkan pemeriksaan atas WP yang tidak menanggapi SP2DK
- 3) Menindaklanjuti data potensial WP non DPP dengan usul pemeriksaan
- 4) Percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding dan tindak lanjut data pemicu
- 5) Percepatan Penyelesaian DPP Semester I Tahun 2024; (LHP2DK selesai maksimal Agustus 2024)
- 6) Percepatan Penyelesaian DPP Semester II Tahun 2024; (SP2DK harus selesai Agustus 2024 untuk Pengawasan Strategis)
- 7) Pengawasan Wajib Pajak Sektoral khususnya terhadap Industri Rokok

c. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan :

- 1) Menambah usulan untuk memenuhi target bahan baku pemeriksaan melalui DSPP RBP Tahap II

- 2) Menambah usulan bahan baku melalui usulan DSPP WP Strategis
- 3) Guna menambah bahan baku masing-masing FPP mengusulkan 2 WP untuk dilakukan pemeriksaan
- 4) Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus DSP4 Kolaboratif
- 5) Pemantauan pembayaran skp terhadap WP yang setuju hasil pemeriksaan
- 6) Penyelesaian SP2 yang untuk memenuhi jumlah konversi LHP
- 7) Mengirim Nd usulan DSPP dengan meminjam ruang terbit ke Kanwil
- 8) Tertib pengisian aplikasi DERIK untuk menambah ruang terbit dan monitoring penyelesaian

d. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Penagihan :

- 1) Penerbitan Surat Teguran segera setelah jatuh tempo pembayaran terlewati
- 2) Penyampaian Surat Paksa kepada Penunggak 100 WP besar KPP
- 3) Melakukan penyitaan asset penanggung pajak melalui pemblokiran rekening dan sita asset Penanggung Pajak
- 4) Melakukan penjualan asset yang telah dilakukan penyitaan
- 5) Melakukan komunikasi dan Tindakan penagihan kepada curator atas WP pailit
- 6) Prioritas penagihan aktif dan persuasif terhadap DSPC sesuai komitmen; (ada 100 WP masuk DSPC)

e. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dari Edukasi WP :

- 1) Melakukan analisis potensi wajib pajak yang masuk dalam CRM DSPT
- 2) Melakukan kegiatan penyuluhan one-on-one terhadap hasil analisis potensi wajib pajak yang masuk dalam CRM DSPT
- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan tata cara pengisian SPT

f. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dari Penegakan Hukum :

- 1) Menyampaikan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil
- 2) Melakukan usulan Pencegahan terhadap Penunggak Pajak

5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kudus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| Jenis Pajak                   | Target                   | Realisasi                | Pencapaian     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. PPh                        | 573.649.527.000          | 583.889.011.286          | 101,78%        |
| 2. PPN & PPnBM                | 533.171.115.000          | 523.050.029.436          | 98,10%         |
| 3. PBB & BPHTB                | 93.038.000               | 0                        | 0              |
| 4. PPh DTP                    | 0                        | 0                        | 0              |
| 5. Pendapatan atas PL dan PIB | 16.646.984.000           | 17.611.570.000           | 105,79%        |
| <b>JUMLAH</b>                 | <b>1.123.560.664.000</b> | <b>1.124.550.610.722</b> | <b>100,09%</b> |

Target dan Realisasi per Fungsi

| No | Jenis              | Target            | Realisasi         | %       |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | PPM                | 1.067.170.091.000 | 1.068.087.274.076 | 100,09% |
| 2  | PKM                |                   |                   |         |
|    | a. Pengawasan      | 46.530.940.000    | 46.646.405.524    | 100,25% |
|    | b. Pemeriksaan     | 6.066.437.000     | 6.066.437.450     | 100,00% |
|    | c. Penagihan       | 3.172.167.000     | 3.172.166.497     | 100,00% |
|    | d. Penegakan Hukum | 43.027.000        | 43.086.081        | 100,14% |
|    | e. Edukasi         | 578.002.000       | 581.001.847       | 100,52% |
|    | Jumlah PKM         | 56.390.573.000    | 56.509.097.399    | 100,21% |
|    | Jumlah             | 1.123.560.664.000 | 1.124.596.371.475 | 100,09% |

Sumber : Mandor-DJP

6. Pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

| Jenis Pajak                   | Realisasi 2023  | Realisasi 2024    | Growth  |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1. PPh                        | 424.237.812.559 | 583.889.011.286   | 37,63%  |
| 2. PPN & PPnBM                | 365.591.958.831 | 523.050.029.436   | 43,07%  |
| 3. PBB & BPHTB                | 15.290.706      | 0                 | -100%   |
| 4. PPh DTP                    | 0               | 0                 | 0       |
| 5. Pendapatan atas PL dan PIB | 21.113.990.588  | 17.611.570.000    | -16,59% |
| Growth Total                  | 810.959.052.684 | 1.124.550.610.722 | 38,67%  |

7. Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| Kode SS/IKU                                        | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                                            | Target  | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i>                     |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 30,00%           | 100,05         |
| 1                                                  | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal                                                     |         |           |            |     |           |                  | 100,05         |
| 1a-CP                                              | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | 100,00% | 100,09%   | Max        | E/L | 26,00%    | 57,78%           | 100,09         |
| 1b-CP                                              | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             | 100,00  | 100,00    | Max        | P/L | 19,00%    | 42,22%           | 100,00         |
| <i>Customer Perspective</i><br>20,00%              |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 20,00%           | 103,74         |
| 2                                                  | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi                                                                 |         |           |            |     |           |                  | 107,28         |
| 2a-CP                                              | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 100,00% | 100,08%   | Max        | E/L | 26,00%    | 57,78%           | 100,08         |
| 2b-CP                                              | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 117,13%   | Max        | P/L | 19,00%    | 42,22%           | 117,13         |
| 3                                                  | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi                                                               |         |           |            |     |           |                  | 100,21         |
| 3a-CP                                              | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 100,00% | 100,21%   | Max        | E/M | 21,00%    | 100,00%          | 100,21         |
| <i>Internal Process Perspective</i><br>25,00%      |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 25,00%           | 116,04         |
| 4                                                  | Edukasi dan pelayanan yang efektif                                                                   |         |           |            |     |           |                  | 114,58         |
| 4a-CP                                              | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 74,00%  | 88,80%    | Max        | E/M | 21,00%    | 50,00%           | 120,00         |
| 4b-N                                               | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan                                                 | 100,00% | 109,15%   | Max        | E/M | 21,00%    | 50,00%           | 109,15         |
| 5                                                  | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 5a-CP                                              | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                | 90,00%  | 115,72%   | Max        | P/M | 14,00%    | 100,00%          | 120,00         |
| 6                                                  | Pengujian kepatuhan material yang efektif                                                            |         |           |            |     |           |                  | 109,20         |
| 6a-CP                                              | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                          | 100,00% | 120,00%   | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 120,00         |
| 6b-N                                               | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                                    | 100,00% | 119,26%   | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 119,26         |
| 6c-N                                               | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                                 | 100,00% | 88,34%    | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 88,34          |
| 7                                                  | Penegakan hukum yang efektif                                                                         |         |           |            |     |           |                  | 116,44         |
| 7a-CP                                              | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                                        | 100,00% | 120,00%   | Max        | P/M | 14,00%    | 26,92%           | 120,00         |
| 7b-CP                                              | Tingkat efektivitas penagihan                                                                        | 75,00%  | 82,70%    | Max        | P/L | 19,00%    | 36,54%           | 110,27         |
| 7c-N                                               | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                                              | 100,00% | 200,00%   | Max        | P/L | 19,00%    | 36,54%           | 120,00         |
| 8                                                  | Data dan informasi yang berkualitas                                                                  |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 8a-CP                                              | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan                    | 100,00% | 138,31%   | Max        | P/M | 14,00%    | 42,42%           | 120,00         |
| 8b-CP                                              | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                                      | 55,00%  | 74,50%    | Max        | P/L | 19,00%    | 57,58%           | 120,00         |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i><br>25,00% |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 25,00%           | 116,85         |
| 9                                                  | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                                                          |         |           |            |     |           |                  | 113,70         |
| 9a-N                                               | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM                                  | 100,00  | 117,48    | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 117,48         |
| 9b-N                                               | Indeks Penilaian Integritas Unit                                                                     | 85,00   | 95,66     | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 112,54         |
| 9c-N                                               | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko                               | 90,00   | 100,00    | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 111,11         |
| 10                                                 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel                                                                  |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 10a-CP                                             | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                                         | 100,00  | 120,00    | Max        | P/M | 14,00%    | 100,00%          | 120,00         |
| Nilai Kinerja Organisasi                           |                                                                                                      |         |           |            |     |           |                  | 108,99         |

8. Penjelasan NKO

Seluruh IKU tercapai sesuai/melebihi target yang ditetapkan, kecuali IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Hal ini disebabkan adanya revisi target PKM yang mengakibatkan perbedaan di aplikasi Mandor dengan penghitungan manual

(berdasarkan KEP-419/WPJ.10/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor KEP-82/WPJ.10/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Tahun Anggaran 2024).

NKO 2024 lebih rendah dibandingkan NK0 2023 disebabkan adanya penambahan target penerimaan pajak 2024 sebesar Rp. 534.673.019.848,00 dari target awal sebesar Rp. 588.887.644.152,00 sehingga total target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 1.123.560.664.000,00

#### Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi

| NO | TAHUN | NKO     |
|----|-------|---------|
| 1  | 2018  | 106,29% |
| 2  | 2019  | 115,38% |
| 3  | 2020  | 106,71% |
| 4  | 2021  | 101,01% |
| 5  | 2022  | 112,99% |
| 6  | 2023  | 113,00% |
| 7  | 2024  | 108,99% |

#### 9. Penghargaan/Capaian Lain

KPP Pratama Kudus merupakan salah satu unit kerja yang telah menjalani Pemantauan dan Evaluasi ZI WBBM pada tahun 2024. Monev dilakukan terhadap unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM, dilakukan paling sedikit 2 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan, dan dilakukan oleh Direktorat KITSDA dan Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK).

Sesuai Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-3782/PJ.11/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM tahun 2024 di Lingkungan DJP, KPP Pratama Kudus ditetapkan sebagai Unit Kerja Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBBM dengan nilai 94.30, peringkat ketiga dengan urutan sebagai berikut :

Peringkat pertama : KPP Pratama Kayu Agung (95,34)  
 Peringkat kedua : KPP Pratama Badung Selatan (94,32)  
 Peringkat ketiga : KPP Pratama Kudus (94,30)

#### 10. Kesimpulan

KPP Pratama Kudus telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan, serta melebihi target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024 sebesar 108,99.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar Penyusunan LAKIN

Sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
  - c. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak
- setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Pimpinan Unit Eselon III di lingkungan DJP diminta untuk menyusun LAKIN tahun 2024 dengan memperhatikan Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Pemilik Kerja (UPK) dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit.

#### 2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Permasalahan utama dalam pencapaian kinerja tahun 2024 terbesar adalah tax gap antara target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2024. Beberapa tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Pengawaan Pembayaran Masa (PPM) :
  - 1) Pengawasan pembayaran dan penyetoran perpajakan
  - 2) pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang jatuh temponya di tahun 2024;
  - 3) pengawasan pembayaran dan kepatuhan atas Instansi Pemerintah Daerah
  - 4) pengawasan pembayaran dan kepatuhan atas Dana Desa
  - 5) Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- b. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan :
  - 1) Menindaklanjuti SP2DK DPP dengan kunjungan (*visit*) dan konseling/usul pemeriksaan
  - 2) Mengumpulkan data lengkap sebagai bahan untuk diusulkan pemeriksaan atas WP yang tidak menanggapi SP2DK
  - 3) Menindaklanjuti data potensial WP non DPP dengan usul pemeriksaan

- 4) Percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding dan tindak lanjut data pemicu
  - 5) Percepatan Penyelesaian DPP Semester I Tahun 2024; (LHP2DK selesai maksimal Agustus 2024)
  - 6) Percepatan Penyelesaian DPP Semester II Tahun 2024; (SP2DK harus selesai Agustus 2024 untuk Pengawasan Strategis)
  - 7) Pengawasan Wajib Pajak Sektorial khususnya terhadap Industri Rokok
- c. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan :
- 1) Menambah usulan untuk memenuhi target bahan baku pemeriksaan melalui DSPP RBP Tahap II
  - 2) Menambah usulan bahan baku melalui usulan DSPP WP Strategis
  - 3) Guna menambah bahan baku masing-masing FPP mengusulkan 2 WP untuk dilakukan pemeriksaan
  - 4) Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus DSP4 Kolaboratif
  - 5) Pemantauan pembayaran skp terhadap WP yang setuju hasil pemeriksaan
  - 6) Penyelesaian SP2 yang untuk memenuhi jumlah konversi LHP
  - 7) Mengirim Nd usulan DSPP dengan meminjam ruang terbit ke Kanwil
  - 8) Tertib pengisian aplikasi DERIK untuk menambah ruang terbit dan monitoring penyelesaian
- d. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Penagihan :
- 1) Penerbitan Surat Teguran segera setelah jatuh tempo pembayaran terlewati
  - 2) Penyampaian Surat Paksa kepada Penunggak 100 WP besar KPP
  - 3) Melakukan penyitaan asset penanggung pajak melalui pemblokiran rekening dan sita asset Penanggung Pajak
  - 4) Melakukan penjualan asset yang telah dilakukan penyitaan
  - 5) Melakukan komunikasi dan Tindakan penagihan kepada curator atas WP pailit
  - 6) Prioritas penagihan aktif dan persuasif terhadap DSPC sesuai komitmen; (ada 100 WP masuk DSPC)
- e. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dari Edukasi WP :
- 1) Melakukan analisis potensi wajib pajak yang masuk dalam CRM DSPT
  - 2) Melakukan kegiatan penyuluhan one-on-one terhadap hasil analisis potensi wajib pajak yang masuk dalam CRM DSPT
  - 3) Melakukan kegiatan penyuluhan tata cara pengisian SPT
- f. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dari Penegakan Hukum :
- 1) Menyampaikan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil
  - 2) Melakukan usulan Pencegahan terhadap Penunggak Pajak

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kudus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

*Pasal 58*, tugas KPP Pratama adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 59*, fungsi KPP Pratama adalah :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor nomor 210/PMK.01/2017 tentang Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kudus terdiri dari Seksi/Subbag sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjamin Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

dengan distribusi SDM sebagai berikut :

SDM Berdasarkan Unit Organisasi

| No | Seksi / Subbag                              | Jumlah |
|----|---------------------------------------------|--------|
| 1  | Kepala Kantor                               | 1      |
| 2  | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal       | 10     |
| 3  | Seksi Penjamin Kualitas Data                | 4      |
| 4  | Seksi Pelayanan                             | 16     |
| 5  | Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | 9      |
| 6  | Seksi Pengawasan I                          | 9      |
| 7  | Seksi Pengawasan II                         | 8      |
| 8  | Seksi Pengawasan III                        | 7      |
| 9  | Seksi Pengawasan IV                         | 8      |
| 10 | Seksi Pengawasan V                          | 8      |
| 11 | Seksi Pengawasan VI                         | 6      |
| 12 | Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak         | 9      |
|    | JUMLAH                                      | 94     |

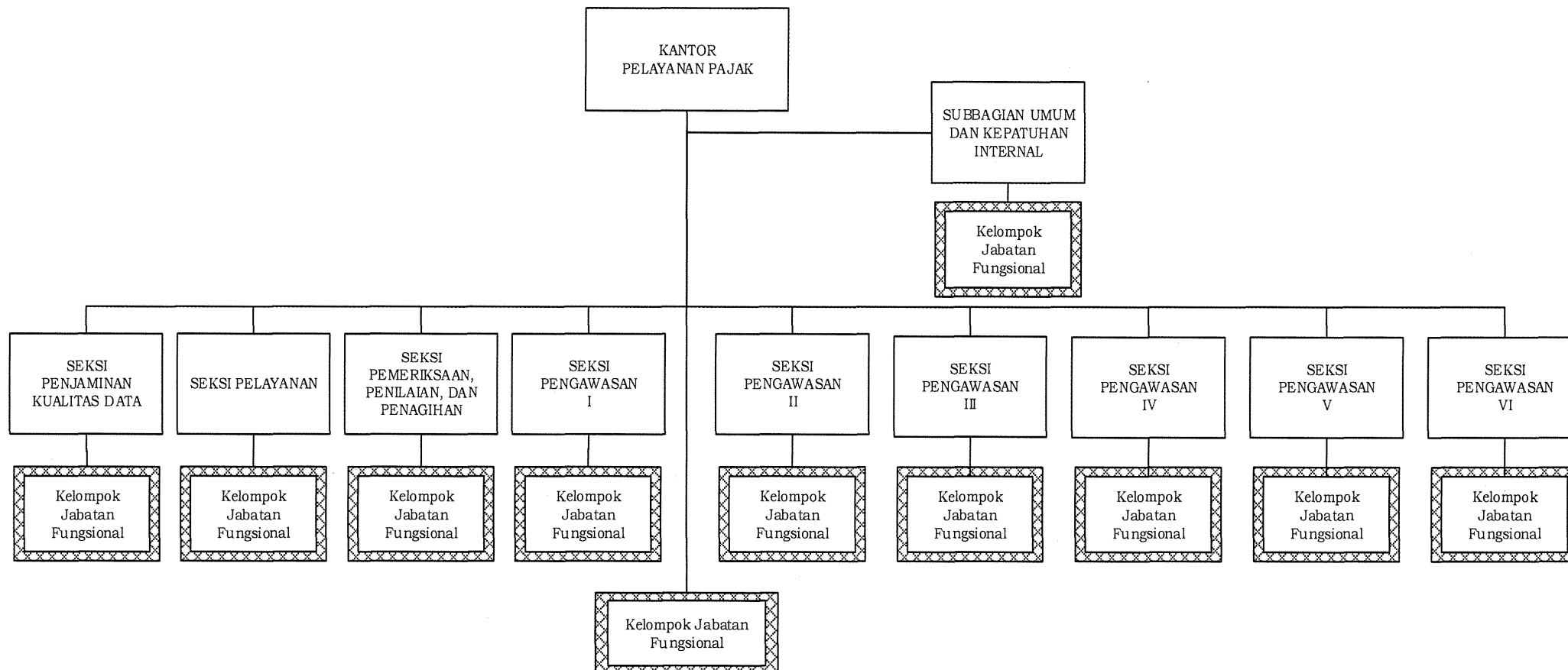
SDM Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

| No | Jabatan                       | Pendidikan |    |    | Jumlah |
|----|-------------------------------|------------|----|----|--------|
|    |                               | < S1       | S1 | S2 |        |
| 1  | Pejabat Administrator         | -          | -  | 1  | 1      |
| 2  | Pejabat Pengawas              | -          | 4  | 6  | 10     |
| 3  | Fungsional Pemeriksa Pajak    | 3          | 6  | -  | 9      |
| 4  | Fungsional Penyuluh Pajak     | -          | 3  | 1  | 4      |
| 5  | Fungsional Penilai Pajak      | 1          | -  | -  | 1      |
| 6  | <i>Account Representative</i> | 9          | 26 | 2  | 37     |
| 7  | Pelaksana                     | 20         | 9  | 1  | 30     |
| 8  | Jurusita Pajak Negara         | -          | 2  | -  | 2      |
|    | JUMLAH                        | 33         | 50 | 11 | 94     |

SDM Berdasarkan Usia dan Gender

| No | Usia       | Jenis Kelamin |        | Jumlah |
|----|------------|---------------|--------|--------|
|    |            | Pria          | Wanita |        |
| 1  | 0 sd 20    | -             | -      | -      |
| 2  | > 20 sd 30 | 14            | 8      | 22     |
| 3  | > 30 sd 40 | 21            | 12     | 33     |
| 4  | > 40 sd 50 | 18            | 5      | 23     |
| 5  | >50        | 12            | 4      | 16     |
|    | JUMLAH     | 65            | 29     | 94     |

## STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA KUDUS



### C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak, dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringkasan Eksekutif | Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bab I</b>        | <b>Pendahuluan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( <i>strategic issues</i> ) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | A.                                                                                                                                                                                                                                                            | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.<br>2. Permasalahan utama ( <i>strategic issues</i> ) yang sedang dihadapi organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | B.                                                                                                                                                                                                                                                            | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja.<br>2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus. |
|                     | C.                                                                                                                                                                                                                                                            | Sistematika Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bab II</b>       | <b>Perencanaan Kinerja</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | A.                                                                                                                                                                                                                                                            | Perencanaan Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | B.                                                                                                                                                                                                                                                            | Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                              | Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bab III</b> | <b>Akuntabilitas Kinerja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | A.                           | Capaian Kinerja Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                              | <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (contoh tabel pada lampiran II);</li> <li>2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja sebagaimana terlampir);</li> <li>b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan</li> <li>d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).</li> </ol> </li> <li>3. Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;</li> <li>4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;</li> <li>5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;</li> <li>6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);</li> <li>7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;</li> <li>8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;</li> <li>9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;</li> <li>10. Rencana aksi ke depan.</li> </ol> |
|                | B.                           | Realisasi Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                              | Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | C.                           | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.                      |
| D.              | Kinerja Lain-Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Pada subbab ini diuraikan <i>achievement</i> antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan <i>benchmarking</i> , atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN                                                                                                                                                                 |
| E.              | Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi. |
| <b>Bab IV</b>   | <b>Penutup</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lampiran</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024</li> <li>2) Lain-lain yang dianggap perlu</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Rencana strategis DJP menjadi acuan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja KPP Pratama Kudus.

##### **1. Visi :**

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

##### **2. Misi :**

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

##### **3. Tujuan :**

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

##### **4. Rencana Strategis :**

Rencana Strategis ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan Refocusing Belanja untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang Terdampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi :
  - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19; dan
  - 2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan.
- 3) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi :
  - 1) Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai;
  - 2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan
  - 3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa Transfer Pricing.

## 2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19.

- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
  - c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalian Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi: 1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi; 2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah; 3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 4) Optimalisasi fungsi Penilaian
  - d. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi
  - e. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Joint Program Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penguatan Joint Program untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak
  - f. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien :

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
  - 1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (knowledge management), DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan Knowledge Management.
  - 2) Pengelolaan organisasi yang efektif.
  - 3) Pengelolaan SDM yang efektif
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian

Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal.

Pedoman pelaksanaan rencana strategis DJP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang tata kelola dan implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024

## **5. Program Kerja**

Program Kerja adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus untuk mendukung Rencana Strategis dan Sasaran Strategis DJP sebagai berikut

:

**a. PROGRAM KERJA SEKSI PENGAWASAN**

**-TERLAMPIR-**

**b. PROGRAM KERJA SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN DAN PENAGIHAN**

**-TERLAMPIR-**

**c. PROGRAM KERJA PELAYANAN DAN PENYULUHAN**

**-TERLAMPIR-**

**d. PROGRAM KERJA SDM**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                    | <b>IKU</b>                                                               | <b>Program Kerja</b>                                  | <b>Timeline</b>                  |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | a Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM    | 1) IHT Teknis / Non Teknis                            | Jan-Des                          |
|           |                                             |                                                                          | 2) IHT Kompetensi Manajerial                          | Jan-Des                          |
|           |                                             |                                                                          | 3) Pelaksanaan ICV untuk Kebintalan SDM               | Jan-Des                          |
|           |                                             | b Indeks Penilaian Integritas Unit                                       | 1) Penanaman Nilai-nilai Kemenkeu melalui program ICV | Jan-Des                          |
|           |                                             | c Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 1) Himbauan Manajemen Kinerja                         | Januari, April, Juli, Oktober    |
|           |                                             |                                                                          | 2) IHT Pengelolaan Kinerja                            | Januari                          |
|           |                                             |                                                                          | 3) Pengelolaan Kinerja Pegawai                        | Januari, Juli, Desember          |
|           |                                             |                                                                          | 4) Penyusunan Piagam Risiko                           | Januari                          |
|           |                                             |                                                                          | 5) Penyusunan Analisa, Evaluasi dan Mitigasi Risiko   | Februari                         |
|           |                                             |                                                                          | 6) Pemantauan dan Review Manajemen Risiko             | Maret, Juni, September, Desember |
| 2         | Pengelolaan keuangan yang akuntabel         | a Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                           | 1) Menyusun rencana belanja/pengeluaran               | Jan-Feb                          |
|           |                                             |                                                                          | 2) Alokasi Anggaran                                   | Jan-Feb                          |
|           |                                             |                                                                          | 3) Pelaksanaan Anggaran sesuai Rencana                | Jan-Des                          |
|           |                                             |                                                                          | 4) Evaluasi Anggaran                                  | Maret, Juni, September, Desember |

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus merupakan perjanjian kinerja dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai atasan langsung. Berikut disampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala KPP Pratama Kudus :

### LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

| DUKUNGAN SUMBER DAYA     |                                                                                                      |                                                                             |       |      |        |      |      |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|------|------|
| 1.                       | 93 pegawai                                                                                           |                                                                             |       |      |        |      |      |      |
| 2.                       | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.          |                                                                             |       |      |        |      |      |      |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN |                                                                                                      |                                                                             |       |      |        |      |      |      |
| 1.                       | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan                                                             |                                                                             |       |      |        |      |      |      |
| No                       | IKI                                                                                                  | Target                                                                      |       |      |        |      |      |      |
|                          |                                                                                                      | Q2                                                                          | Smt.1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y    |      |
| 1                        | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | 48%                                                                         | 48%   | 74%  | 74%    | 100% | 100% |      |
| 2                        | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             | 100                                                                         | 100   | 100  | 100    | 100  | 100  |      |
| 3                        | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 48%                                                                         | 48%   | 74%  | 74%    | 100% | 100% |      |
| 4                        | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 80%                                                                         | 80%   | 90%  | 90%    | 100% | 100% |      |
| 5                        | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 50%                                                                         | 50%   | 75%  | 75%    | 100% | 100% |      |
| 6                        | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 40%                                                                         | 40%   | 60%  | 60%    | 74%  | 74%  |      |
| 7                        | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan                                                 | 5%                                                                          | 10%   | 5%   | 15%    | 85%  | 100% |      |
|                          | 8                                                                                                    | Persentase Pengawasan Pembayaran Masa                                       | 90%   | 90%  | 90%    | 90%  | 90%  | 90%  |
|                          | 9                                                                                                    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% |
|                          | 10                                                                                                   | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                           | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% |

|                    |                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 11                 | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                                                 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12                 | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian                                                                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13                 | Tingkat Efektivitas Penagihan                                                                                        | 30%  | 30%  | 45%  | 45%  | 75%  | 75%  |
| 14                 | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                                                              | 50%  | 50%  | 75%  | 75%  | 100% | 100% |
| 15                 | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan                                    | 50%  | 50%  | 80%  | 80%  | 100% | 100% |
| 16                 | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                                                      | 25%  | 25%  | 40%  | 40%  | 55%  | 55%  |
| 17                 | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM                                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 18                 | Indeks Penilaian Integritas Unit                                                                                     | -    | -    | -    | -    | 85   | 85   |
| 19                 | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko                                               | 47   | 47   | 70   | 70   | 90   | 90   |
| 20                 | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                                                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>KONSEKUENSI</b> |                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |
| 1.                 | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>                     |      |      |      |      |      |      |
| 2.                 | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |      |      |      |      |      |      |

Target penerimaan pajak dari SKP di atas adalah sebagai berikut :

| No | Jenis              | Target            |
|----|--------------------|-------------------|
| 1  | PPM                | 1.067.170.091.000 |
| 2  | PKM                |                   |
|    | a. Pengawasan      | 46.530.940.000    |
|    | b. Pemeriksaan     | 6.066.437.000     |
|    | c. Penagihan       | 3.172.167.000     |
|    | d. Penegakan Hukum | 43.027.000        |
|    | e. Edukasi         | 578.002.000       |
|    | Jumlah PKM         | 56.390.573.000    |
|    | Jumlah             | 1.123.560.664.000 |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

| Kode SS/IKU                              | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                                            | Target  | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i>           |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 30,00%           | 100,05         |
| 1                                        | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal                                                     |         |           |            |     |           |                  | 100,05         |
| 1a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | 100,00% | 100,09%   | Max        | E/L | 26,00%    | 57,78%           | 100,09         |
| 1b-CP                                    | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             | 100,00  | 100,00    | Max        | P/L | 19,00%    | 42,22%           | 100,00         |
| <i>Customer Perspective</i>              |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 20,00%           | 103,74         |
| 2                                        | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi                                                                 |         |           |            |     |           |                  | 107,28         |
| 2a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 100,00% | 100,08%   | Max        | E/L | 26,00%    | 57,78%           | 100,08         |
| 2b-CP                                    | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 117,13%   | Max        | P/L | 19,00%    | 42,22%           | 117,13         |
| 3                                        | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi                                                               |         |           |            |     |           |                  | 100,21         |
| 3a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 100,00% | 100,21%   | Max        | E/M | 21,00%    | 100,00%          | 100,21         |
| <i>Internal Process Perspective</i>      |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 25,00%           | 116,04         |
| 4                                        | Edukasi dan pelayanan yang efektif                                                                   |         |           |            |     |           |                  | 114,58         |
| 4a-CP                                    | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 74,00%  | 88,80%    | Max        | E/M | 21,00%    | 50,00%           | 120,00         |
| 4b-N                                     | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan                                                 | 100,00% | 109,15%   | Max        | E/M | 21,00%    | 50,00%           | 109,15         |
| 5                                        | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 5a-CP                                    | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                | 90,00%  | 115,72%   | Max        | P/M | 14,00%    | 100,00%          | 120,00         |
| 6                                        | Pengujian kepatuhan material yang efektif                                                            |         |           |            |     |           |                  | 109,20         |
| 6a-CP                                    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                          | 100,00% | 120,00%   | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 120,00         |
| 6b-N                                     | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                                    | 100,00% | 119,26%   | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 119,26         |
| 6c-N                                     | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                                 | 100,00% | 88,34%    | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 88,34          |
| 7                                        | Penegakan hukum yang efektif                                                                         |         |           |            |     |           |                  | 116,44         |
| 7a-CP                                    | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                                        | 100,00% | 120,00%   | Max        | P/M | 14,00%    | 26,92%           | 120,00         |
| 7b-CP                                    | Tingkat efektivitas penagihan                                                                        | 75,00%  | 82,70%    | Max        | P/L | 19,00%    | 36,54%           | 110,27         |
| 7c-N                                     | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                                              | 100,00% | 200,00%   | Max        | P/L | 19,00%    | 36,54%           | 120,00         |
| 8                                        | Data dan informasi yang berkualitas                                                                  |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 8a-CP                                    | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan                    | 100,00% | 138,31%   | Max        | P/M | 14,00%    | 42,42%           | 120,00         |
| 8b-CP                                    | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                                      | 55,00%  | 74,50%    | Max        | P/L | 19,00%    | 57,58%           | 120,00         |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |                                                                                                      |         |           |            |     |           | 25,00%           | 116,85         |
| 9                                        | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                                                          |         |           |            |     |           |                  | 113,70         |
| 9a-N                                     | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM                                   | 100,00  | 117,48    | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 117,48         |
| 9b-N                                     | Indeks Penilaian Integritas Unit                                                                     | 85,00   | 95,66     | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 112,54         |
| 9c-N                                     | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko                               | 90,00   | 100,00    | Max        | P/M | 14,00%    | 33,33%           | 111,11         |
| 10                                       | Pengelolaan keuangan yang akuntabel                                                                  |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 10a-CP                                   | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                                         | 100,00  | 120,00    | Max        | P/M | 14,00%    | 100,00%          | 120,00         |
| Nilai Kinerja Organisasi                 |                                                                                                      |         |           |            |     |           |                  | 108,99         |

## 1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 1a-CP       | Persentase realisasi penerimaan pajak     | 100,00% | 100,09%   | 26,00%    | 57,78%           | 100,09         |

### Sasaran Strategis :

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

### Deskripsi IKU :

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

### Formula :

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Target dan Realisasi per Fungsi

| No | Jenis              | Target            | Realisasi         | %       |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | PPM                | 1.067.170.091.000 | 1.068.087.274.076 | 100,09% |
| 2  | PKM                |                   |                   |         |
|    | a. Pengawasan      | 46.530.940.000    | 46.646.405.524    | 100,25% |
|    | b. Pemeriksaan     | 6.066.437.000     | 6.066.437.450     | 100,00% |
|    | c. Penagihan       | 3.172.167.000     | 3.172.166.497     | 100,00% |
|    | d. Penegakan Hukum | 43.027.000        | 43.086.081        | 100,14% |
|    | e. Edukasi         | 578.002.000       | 581.001.847       | 100,52% |
|    | Jumlah PKM         | 56.390.573.000    | 56.509.097.399    | 100,21% |
|    | Jumlah             | 1.123.560.664.000 | 1.124.596.371.475 | 100,09% |

Sumber : Mandor-DJP

### **Upaya Ekstra untuk mencapai target**

#### **a. Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) :**

- 1) Pengawasan pembayaran dan penyetoran perpajakan
- 2) pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang jatuh temponya di tahun 2024;
- 3) pengawasan pembayaran dan kepatuhan atas Instansi Pemerintah Daerah
- 4) pengawasan pembayaran dan kepatuhan atas Dana Desa
- 5) Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25

#### **b. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan :**

- 1) Menindaklanjuti SP2DK DPP dengan kunjungan (*visit*) dan konseling/usul pemeriksaan
- 2) Mengumpulkan data lengkap sebagai bahan untuk diusulkan pemeriksaan atas WP yang tidak menanggapi SP2DK
- 3) Menindaklanjuti data potensial WP non DPP dengan usul pemeriksaan
- 4) Percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding dan tindak lanjut data pemicu
- 5) Percepatan Penyelesaian DPP Semester I Tahun 2024; (LHP2DK selesai maksimal Agustus 2024)
- 6) Percepatan Penyelesaian DPP Semester II Tahun 2024; (SP2DK harus selesai Agustus 2024 untuk Pengawasan Strategis)
- 7) Pengawasan Wajib Pajak Sektoral khususnya terhadap Industri Rokok

#### **c. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan :**

- 1) Menambah usulan untuk memenuhi target bahan baku pemeriksaan melalui DSPP RBP Tahap II
- 2) Menambah usulan bahan baku melalui usulan DSPP WP Strategis
- 3) Guna menambah bahan baku masing-masing FPP mengusulkan 2 WP untuk dilakukan pemeriksaan
- 4) Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus DSP4 Kolaboratif
- 5) Pemantauan pembayaran skp terhadap WP yang setuju hasil pemeriksaan
- 6) Penyelesaian SP2 yang untuk memenuhi jumlah konversi LHP
- 7) Mengirim Nd usulan DSPP dengan meminjam ruang terbit ke Kanwil
- 8) Tertib pengisian aplikasi DERIK untuk menambah ruang terbit dan monitoring penyelesaian

#### **d. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Penagihan :**

- 1) Penerbitan Surat Teguran segera setelah jatuh tempo pembayaran terlewati

- 2) Penyerahan Surat Paksa kepada Penunggak 100 WP besar KPP
  - 3) Melakukan penyitaan aset penanggung pajak melalui pemblokiran rekening dan sita aset Penanggung Pajak
  - 4) Melakukan penjualan aset yang telah dilakukan penyitaan
  - 5) Melakukan komunikasi dan Tindakan penagihan kepada curator atas WP pailit
  - 6) Prioritas penagihan aktif dan persuasif terhadap DSPC sesuai komitmen; (ada 100 WP masuk DSPC)
- e. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dari Edukasi WP :
- 1) Melakukan analisis potensi wajib pajak yang masuk dalam CRM DSPT
  - 2) Melakukan kegiatan penyuluhan one-on-one terhadap hasil analisis potensi wajib pajak yang masuk dalam CRM DSPT
  - 3) Melakukan kegiatan penyuluhan tata cara pengisian SPT
- f. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dari Penegakan Hukum :
- 1) Menyampaikan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil
  - 2) Melakukan usulan Pencegahan terhadap Penunggak Pajak

## 2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                                | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 1b-CP       | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 100,00    | 19,00%    | 42,22%           | 100,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                 | KUANTITAS | JENIS | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1  | Membuat prognosa penerimaan per bulan         | 12        | Bulan | 12 bulan |
| 2  | Menghubungi WP pembayar terbesar terutama PPN | 12        | Bulan | 12 bulan |

## 3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                            | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 2a-CP       | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,09%   | 26,00%    | 57,78%           | 100,08         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                   | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Penerbitan STP berdasarkan Daftar Nominatif atas tahun berjalan | 4         | Kegiatan | 4 bulan  |
| 2  | Pemanfaatan data pemicu / data matching tahun berjalan          | 12        | Kegiatan | 12 bulan |
| 3  | Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25                                | 6         | Kegiatan | 6 bulan  |
| 4  | Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)             | 2         | Semester | 12 bulan |

**4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                                            | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 2b-CP       | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 117,13%   | 19,00%    | 42,22%           | 117,13         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                             | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|-------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Layanan Di luar Kantor (MTU)              | 24        | Kegiatan | 4 bulan  |
| 2  | Layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP)    | 32        | Kegiatan | 8 bulan  |
| 3  | WA Blast himbauan penyampaian SPT Tahunan | 12        | Kegiatan | 12 bulan |
| 4  | Satgas penerimaan SPT Tahunan             | 80        | Kegiatan | 4 bulan  |

**5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                              | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 3a-CP       | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 100,21%   | 21,00%    | 100,00%          | 100,21         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                                           | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Penerbitan STP berdasarkan Daftar Nominatif atas tahun pajak selain tahun berjalan 2025 | 4         | Kegiatan | 12 bulan |
| 2  | Menindaklanjuti SP2DK Outstanding dan SP2DK berdasarkan DPP                             | 2         | Semester | 12 bulan |
| 3  | Pemanfaatan data pemicu / data matching tahun berjalan                                  | 12        | Kegiatan | 12 bulan |

**6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                          | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 4a-CP       | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80%    | 21,00%    | 50,00%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA          | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Penyuluhan One on One  | 480       | Kegiatan | 12 bulan |
| 2  | Penyuluhan One to Many | 24        | Kegiatan | 12 bulan |
| 3  | Kelas Pajak            | 32        | Kegiatan | 12 bulan |

## 7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama            | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 4b-N        | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% | 109,15%   | 21,00%    | 50,00%           | 109,15         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                          | KUANTITAS | JENIS      | WAKTU    |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 1  | Percepatan pelayanan SKB                               | 480       | Permohonan | 12 bulan |
| 2  | Pembuatan papan informasi persyaratan layanan unggulan | 3         | Unit       | 12 bulan |

## 8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 5a-CP       | Persentase pengawasan pembayaran masa     | 90,00% | 115,72%   | 14,00%    | 100,00%          | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                   | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Penerbitan STP berdasarkan Daftar Nominatif atas tahun berjalan | 4         | Kegiatan | 4 bulan  |
| 2  | Pemanfaatan data pemicu / data matching tahun berjalan          | 12        | Kegiatan | 12 bulan |
| 3  | Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25                                | 6         | Kegiatan | 6 bulan  |
| 4  | Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)             | 2         | Semester | 12 bulan |

## 9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                   | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 6a-CP       | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% | 120,00%   | 14,00%    | 33,33%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                             | KUANTITAS | JENIS | WAKTU    |
|----|-------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1  | Menindaklanjuti DPP dan SP2DK outstanding | 1200      | WP    | 12 bulan |
| 2  | Mempercepat penyelesaian LHP2DK           | 1200      | WP    | 12 bulan |

## 10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama         | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 6b-N        | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 119,26%   | 14,00%    | 33,33%           | 119,26         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                                           | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Penerbitan STP berdasarkan Daftar Nominatif atas tahun pajak selain tahun berjalan 2025 | 4         | Kegiatan | 12 bulan |

|   |                                                        |    |          |          |
|---|--------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 2 | Pemanfaatan data pemicu / data matching tahun berjalan | 12 | Kegiatan | 12 bulan |
|---|--------------------------------------------------------|----|----------|----------|

#### 11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                            | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 6c-N        | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% | 88,34%    | 14,00%    | 33,33%           | 88,34          |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                                   | KUANTITAS | JENIS   | WAKTU    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1  | Penyusunan laporan tepat waktu                                                  | 4         | Laporan | 12 bulan |
| 2  | Usul pemeriksaan khusus dengan potensi besar                                    | 4         | Usulan  | 12 bulan |
| 3  | Meningkatkan <i>Success Rate</i> dengan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan | 86        | LHP     | 12 bulan |

#### 12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama     | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 7a-CP       | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 120,00%   | 14,00%    | 26,92%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                                           | KUANTITAS | JENIS   | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1  | Penyusunan DSPP Kolaboratif                                                             | 2         | Usulan  | 2 bulan  |
| 2  | Penyusunan DSPP RBP                                                                     | 2         | Usulan  | 2 bulan  |
| 3  | Penyelesaian tunggakan pemeriksaan Khusus tahun sebelumnya                              | 28        | LHP     | 4 bulan  |
| 4  | Penyelesaian tunggakan Pemeriksaan Khusus yang akan jatuh tempo tahun berjalan oleh FPP | 76        | LHP     | 12 bulan |
| 5  | Usulan pemeriksaan data konkret dari Seksi Pengawasan                                   | 5         | WP      | 12 bulan |
| 6  | Penyelesaian Pemeriksaan SPT LB                                                         | 48        | LHP     | 12 bulan |
| 7  | Pengawasan Pembayaran SKP terbit tahun berjalan sebelum JT                              | 12        | Laporan | 12 bulan |
| 8  | Penyusunan DSPPn                                                                        | 1         | Usulan  | 1 bulan  |
| 9  | Penyelesaian Tunggakan SPPn tahun sebelumnya                                            | 6         | LHHPn   | 5 bulan  |
| 10 | Penyelesaian SPPn tahun berjalan                                                        | 6         | LHHPn   | 12 bulan |
| 11 | Penilaian SPOP PBB P5L                                                                  | 4         | SPOP    | 2 bulan  |

### 13. IKU Tingkat efektivitas penagihan

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 7b-CP       | Tingkat efektivitas penagihan             | 75,00% | 82,70%    | 19,00%    | 36,54%           | 110,27         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                                                     | KUANTITAS | JENIS      | WAKTU    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 1  | Penyusunan DSPC                                                                   | 100       | WP         | 1 bulan  |
| 2  | Adjustment DSPC                                                                   | 25        | WP         | 1 bulan  |
| 3  | Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka pengumpulan data aset penanggung pajak | 75        | WP         | 12 bulan |
| 4  | Penerbitan Surat Paksa melalui Coretax                                            | 750       | SP         | 11 bulan |
| 5  | Penerbitan SPMP melalui Coretax                                                   | 100       | SPMP       | 11 bulan |
| 6  | Penerbitan surat Blokir melalui Coretax                                           | 100       | Blokir     | 11 bulan |
| 7  | Melakukan penjualan aset sitaan (lelang)                                          | 35        | WP         | 11 bulan |
| 8  | monitoring penerimaan PKM Penagihan triwulanan                                    | 4         | Kegiatan   | 12 bulan |
| 9  | pelayanan angsuran utang pajak tepat waktu sesuai permohonan WP                   |           | Permohonan | 12 bulan |
| 10 | Pemberian layanan konfirmasi tepat waktu sesuai permohonan WP Pindah              | 50        | Permohonan | 12 bulan |
| 11 | Penyelesaian pemeriksaan penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP                      | 300       | LHP        | 11 bulan |
| 12 | Penatausahaan penghapusan piutang pajak deluwarasa                                | 2         | Usulan     | 2 bulan  |

### 14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama               | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 7c-N        | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% | 200,00%   | 19,00%    | 36,54%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                    | KUANTITAS | JENIS | WAKTU    |
|----|----------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1  | Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 6         | WP    | 12 bulan |

### 15. IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                                         | Target  | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 8a-CP       | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 120,00%   | 14,00%    | 42,42%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                            | KUANTITAS | JENIS     | WAKTU    |
|----|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | Penyusunan basis data melalui pengamatan | 12        | Laporan   | 12 bulan |
| 2  | Penyusunan basis data melalui MATOA/KPDL | 30        | Kelurahan | 10 bulan |

## 16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama       | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 8b-CP       | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | 74,50%    | 19,00%    | 57,58%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                      | KUANTITAS | JENIS     | WAKTU    |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | Kunjungan ke Pemda Kudus (BPPKAD)                  | 4         | Kunjungan | 12 bulan |
| 2  | Koordinasi melalui telepon ke Pemda Kudus (BPPKAD) | 24        | Kegiatan  | 12 bulan |

## 17. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                           | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 9a-N        | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 | 120,00    | 14,00%    | 33,33%           | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                        | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|--------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | IHT Teknis / Non Teknis              | 12        | Kegiatan | 12 bulan |
| 2  | IHT Kompetensi Manajerial            | 2         | Kegiatan | 12 bulan |
| 3  | Pelaksanaan ICV untuk Kebintalan SDM | 12        | Kegiatan | 12 bulan |

## 18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 9b-N        | Indeks Penilaian Integritas Unit          | 85,00  | 95,66     | 14,00%    | 33,33%           | 112,54         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                      | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Penanaman Nilai-nilai Kemenkeu melalui program ICV | 12        | Kegiatan | 12 bulan |
| 2  | Pakta Integritas untuk layanan WP                  | 48        | Kegiatan | 12 bulan |

## 19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama                              | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 9c-N        | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00  | 100,00    | 14,00%    | 33,33%           | 111,11         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                                    | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Himbauan Manajemen Kinerja                       | 4         | Kegiatan | 12 bulan |
| 2  | IHT Pengelolaan Kinerja                          | 2         | Kegiatan | 2 bulan  |
| 3  | Pengelolaan Kinerja Pegawai                      | 4         | Kegiatan | 4 bulan  |
| 4  | Penyusunan Piagam Risiko                         | 1         | Kegiatan | 1 bulan  |
| 5  | Penyusunan Analisa, Evaluasi dan Mitigasi Risiko | 48        | Kegiatan | 12 bulan |
| 6  | Pemantauan dan Review Manajemen Risiko           | 2         | Kegiatan | 2 bulan  |

## 20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama    | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 10a-CP      | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00    | 14,00%    | 100,00%          | 120,00         |

Rencana kerja 2025 :

| NO | RENCANA KERJA                        | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|--------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Menyusun rencana belanja/pengeluaran | 4         | Kegiatan | 4 bulan  |
| 2  | Alokasi Anggaran                     | 4         | Kegiatan | 4 bulan  |
| 3  | Revisi Anggaran                      | 2         | Kegiatan | 2 bulan  |
| 4  | Pelaksanaan Anggaran sesuai Rencana  | 120       | Kegiatan | 12 bulan |
| 5  | Evaluasi Anggaran                    | 4         | Kegiatan | 4 bulan  |

### Rencana Kerja untuk Tahun 2025 Di Luar IKU

#### 1. Pembangunan Zona Integritas untuk Keberlanjutan WBBM

| NO | RENCANA KERJA                                                 | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU   |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 1  | Sosialisasi Pembangunan ZI WBBM kepada Internal dan Eksternal | 2         | Kegiatan | 2 bulan |
| 2  | Penyusunan Rencana Kerja ZI WBBM                              | 1         | Kegiatan | 1 bulan |
| 3  | Pelaksanaan Program Kerja ZI WBBM                             | 24        | Kegiatan | 1 bulan |

#### 2. Pengelolaan Media Sosial KPP Pratama Kudus

| NO | RENCANA KERJA                            | KUANTITAS | JENIS    | WAKTU    |
|----|------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | Pembuatan materi medos KPP Pratama Kudus | 12        | Kegiatan | 12 bulan |

#### 3. Pelaksanaan Helpdesk Coretax KPP Pratama Kudus

| NO | RENCANA KERJA                      | KUANTITAS | JENIS  | WAKTU   |
|----|------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1  | Penyusunan Jadwal Helpdesk Coretax | 4         | Jadwal | 4 bulan |

|   |                              |    |          |         |
|---|------------------------------|----|----------|---------|
| 2 | Pelaksanaan Helpdesk Coretax | 80 | Kegiatan | 4 bulan |
|---|------------------------------|----|----------|---------|

## B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Dana DIPA tahun 2024 sebesar Rp.5.542.988.000. Adapun realisasi penyerapan DIPA tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.415.958.138 atau 97.71%. Adapun penilaian kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

### 1. Nilai SMART

| Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja |                   |                                      |                         |                         |                                            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|                                     |                   |                                      |                         |                         | Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker |
| Download Excel                      |                   |                                      |                         |                         |                                            |
| Tampilkan                           | 25                | entri                                | Cari:                   |                         |                                            |
| No.                                 | Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja                         | NK Perencanaan Anggaran | NK Pelaksanaan Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran                     |
| 1                                   | 119457            | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS | 100,00                  | 97,56                   | 98,78                                      |
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri |                   |                                      |                         |                         |                                            |
| Sebelumnya                          |                   |                                      |                         |                         | Selanjutnya                                |

### 2. Nilai IKPA

| Indikator Pelaksanaan Anggaran   |           |         |             |                                      |             |                               |                          |                               |                     |                      |                        |                                     |             |
|----------------------------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|
| FILTER: SAMPAI DENGAN   DESEMBER |           |         |             |                                      |             |                               |                          |                               |                     |                      |                        |                                     |             |
| NO                               | KODE KPPN | KODE BA | KODE SATKER | URAIAN SATKER                        | KETERANGAN  | KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN |                          | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                     |                      |                        | KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN | NILAI TOTAL |
|                                  |           |         |             |                                      |             | REVISI DIPA                   | DEVIASI HALAMAN III DIPA | PENYERAPAN ANGGARAN           | BELANJA KONTRAKTUAL | PENYELESAIAN TAGIHAN | PENGELOLAAN UP DAN TUP |                                     |             |
| 1                                | 129       | 015     | 119457      | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS | Nilai       | 100.00                        | 94.24                    | 94.60                         | 0.00                | 0.00                 | 99.92                  | 100.00                              | 78.05       |
|                                  |           |         |             |                                      | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 0                   | 0                    | 10                     | 25                                  | 80%         |
|                                  |           |         |             |                                      | Nilai Akhir | 10.00                         | 14.14                    | 18.92                         | 0.00                | 0.00                 | 9.99                   | 25.00                               | 0.00        |
|                                  |           |         |             |                                      | Nilai Aspek | 97.12                         |                          | 97.26                         |                     |                      |                        | 100.00                              |             |

### 3. Formula IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

NKA realisasi = (50% x IKPA + 50% x SMART)

NKA realisasi = (50% x 97,56) + (50% x 100)

NKA realisasi = 98.78

NKA target = 91.00%

Konversi :

| Indeks Tw IV  | Formula Konversi Tw IV                | Kriteria Indeks               |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 120           | 120                                   | Realisasi IKKPA > 95,00       |
| 100 < X < 120 | 100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 ** | (91,00<Realisasi IKKPA<95,00) |
| 100           | 100                                   | Realisasi IKKPA = 91,00       |
| 80 < X < 100  | 80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *  | (80,00<Realisasi IKKPA<91,00) |
| 80            | 80                                    | Realisasi IKKPA = 80,00       |

|      |      |                         |
|------|------|-------------------------|
| 79,9 | 79,9 | Realisasi IKKPA < 80,00 |
|------|------|-------------------------|

**Capaian NKA : 120%**

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **1. Efisiensi Dana DIPA**

DIPA tahun 2024 sebesar Rp.5.542.988.000. Adapun realisasi penyerapan DIPA tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.415.958.138 atau 97.71%. Dengan realisasi penyerapan anggaran tersebut, Capaian Output tercapai sebesar 100%, dengan Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut :

Target : 91.00%

Realisasi : 98,78%

Capaian : 120% (konversi nilai : jika nilai realisasi diatas 95%, maka capaian 120%)

Beberapa tindakan yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran adalah :

- a. pemetaan terhadap kebutuhan belanja rumah tangga untuk KPP Pratama Kudus dengan meminimalisir pengeluaran yang dirasa kurang efektif;
- b. melakukan percepatan realisasi barang dan jasa;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dengan melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara rutin;
- d. melakukan pergeseran akun untuk belanja modal mengingat tidak adanya anggaran yang dikhususkan untuk belanja modal, walaupun mengakibatkan berkurangnya anggaran akun yang lain, terutama di akun pemeliharaan;

#### **2. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara**

- a. Penghapusan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa Nissan Grand Livina tahun 2008;
- b. Usul Penghapusan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa sepeda motor Suzuki Econos tahun 1999 dengan kondisi rusak berat;
- c. Sewa 1 (satu) unit mobil untuk kendaraan operasional berupa Toyota Avanza tahun 2024
- d. Usul penghapusan berupa perangkat TIK sebagai berikut :
  - Notebook : 28 unit, kondisi rusak berat
  - PC : 58 unit, kondisi rusak berat
- e. Sewa BMN berupa tanah untuk Kantin pegawai KPP Pratama Kudus dengan luas 9 m<sup>2</sup> atas nama Ida Sri Hidayatun;
- f. Renovasi / Pemeliharaan Ruang Aula Gunung Muria Lantai 2;
- g. Renovasi / Pemeliharaan Ruang Aula Sunan Kudus Lantai 1;
- h. Renovasi / Pemeliharaan Ruang Kerja SUKI;
- i. Renovasi / Pemeliharaan 2 (dua) unit rumah dinas di Jl. Diponegoro, Kudus;

j. Usul pengadaan / pemeliharaan ke Kantor Pusat DJP/Kemenkeu

| No | BMN                              | Usul    |
|----|----------------------------------|---------|
| 1  | Mesin Fotocopy                   | 6 unit  |
| 2  | Rumah Negara Tipe C              | 3 unit  |
| 3  | Bangunan Gedung Kantor untuk FWS | 1 unit  |
| 4  | Laptop                           | 60 unit |
| 5  | Tablet PC                        | 15 Unit |
| 6  | PC Unit                          | 3 unit  |
| 7  | Sepeda Motor                     | 2 unit  |
| 8  | Mobil Dinas                      | 1 unit  |

Data Kendaraan Dinas KPP Pratama Kudus

| NO | KENDARAAN DINAS                        | MERK                                           | KONDISI      | TAHUN |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1  | Station Wagon                          | INNOVA 2.0 G M/T                               | Baik         | 2023  |
| 2  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)  | Toyota Kijang Innova Tipe G M/T                | Baik         | 2011  |
| 3  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ) | Toyota New Kijang Innova G M/T Bensin Vin 2015 | Baik         | 2015  |
| 4  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ) | MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) A/T       | Baik         | 2020  |
| 5  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ALL NEW ERTIGA GX HYBRID AT                    | Baik         | 2023  |
| 6  | Pick Up                                | MITSUBISHI TRITON 2.5L DC Exceed M/T 2016      | Baik         | 2016  |
| 7  | Sepeda Motor                           | Suzuki Econos                                  | Rusak Berat  | 1999  |
| 8  | Sepeda Motor                           | Suzuki Econos                                  | Rusak Berat  | 1999  |
| 9  | Sepeda Motor                           | Honda Supra 125 SD                             | Rusak Ringan | 2006  |
| 10 | Sepeda Motor                           | Suzuki New Shogun 125 RR                       | Baik         | 2008  |
| 11 | Sepeda Motor                           | Yamaha MX King 150                             | Baik         | 2015  |
| 12 | Sepeda Motor                           | Yamaha New Soul GT 125 Bluecore 2016           | Baik         | 2016  |
| 13 | Sepeda Motor                           | Yamaha NMAX                                    | Baik         | 2017  |
| 14 | Sepeda Motor                           | Yamaha NMAX                                    | Baik         | 2017  |
| 15 | Sepeda Motor                           | Yamaha Lexi-S VIN 2019                         | Baik         | 2021  |
| 16 | Sepeda Motor                           | Yamaha NMAX 155                                | Baik         | 2023  |
| 17 | Sepeda Motor                           | Yamaha All New Vixion                          | Baik         | 2022  |
| 18 | Sepeda Motor                           | Yamaha All New Vixion                          | Baik         | 2022  |
| 19 | Sepeda Motor                           | Yamaha All New Vixion                          | Baik         | 2022  |
| 20 | Sepeda Motor                           | Yamaha All New Vixion                          | Baik         | 2022  |
| 21 | Sepeda Motor                           | Yamaha Lexy                                    | Baik         | 2024  |

|           |                        |             |                |              |
|-----------|------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 22        | Sepeda Motor           | Yamaha Lexy | Baik           | 2024         |
| <b>NO</b> | <b>KENDARAAN DINAS</b> | <b>MERK</b> | <b>KONDISI</b> | <b>TAHUN</b> |
| 23        | Sepeda Motor           | Yamaha Lexy | Baik           | 2024         |
| 24        | Sepeda Motor           | Yamaha Lexy | Baik           | 2024         |
| 25        | Sepeda Motor           | Yamaha Lexy | Baik           | 2024         |
| 26        | Sepeda Motor           | Yamaha Lexy | Baik           | 2024         |

### 3. Analisa Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya (sumber : SAKTI)

| <b>No</b> | <b>Rincian Output</b>                                                                               | <b>Persentase Penyerapan Anggaran</b> | <b>Progress Capaian RO</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1         | 004 - Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi | 64.40%                                | 100.00%                    |
| 2         | 005 - Formulir Kegiatan Pengumpulan Data                                                            | 88.85%                                | 100.00%                    |
| 3         | 003 - Layanan dan Konsultasi Perpajakan                                                             | 83.51%                                | 100.00%                    |
| 4         | 005 - Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan                                                   | 80.91%                                | 100.00%                    |
| 5         | 001 - Dokumen Penagihan Aktif                                                                       | 50.43%                                | 100.00%                    |
| 6         | 003 - Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan                                                          | 14.54%                                | 100.00%                    |
| 7         | 004 - Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan     | 92.53%                                | 100.00%                    |
| 8         | 005 - Laporan Penilaian                                                                             | 0.00%                                 | 100.00%                    |
| 9         | 003 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                                                        | 97.12%                                | 100.00%                    |
| 10        | 001 - Kerumahtanggaan                                                                               | 87.38%                                | 100.00%                    |
| 11        | 994 - Layanan Perkantoran                                                                           | 95.79%                                | 100.00%                    |
| 12        | 002 - Peralatan Fasilitas Perkantoran                                                               | 98.93%                                | 100.00%                    |
| 13        | 994 - Layanan Perkantoran                                                                           | 80.77%                                | 100.00%                    |
|           | <b>J u m l a h</b>                                                                                  | <b>97,71%</b>                         | <b>100.00%</b>             |

Berdasarkan Analisa di atas, seluruh capaian output tercapai 100%, berarti seluruh sumber daya telah dimanfaatkan secara efisien.

#### D. Kinerja Lain-lain

KPP Pratama Kudus merupakan salah satu unit kerja yang telah menjalani Pemantauan dan Evaluasi ZI WBBM pada tahun 2024. Monev dilakukan terhadap unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM, dilakukan paling sedikit 2 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan, dan dilakukan oleh Direktorat KITSDA dan Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK).

Sesuai Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-3782/PJ.11/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM tahun

2024 di Lingkungan DJP, KPP Pratama Kudus ditetapkan sebagai Unit Kerja Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBBM dengan nilai 94.30, peringkat ketiga dengan urutan sebagai berikut :

Peringkat pertama : KPP Pratama Kayu Agung (95,34)  
 Peringkat kedua : KPP Pratama Badung Selatan (94,32)  
 Peringkat ketiga : KPP Pratama Kudus (94,30)

#### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja diatur dalam Rencana Pemantauan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPP Pratama Kudus, sebagai mana di atur dalam Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-7/PJ/PJ.11/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Penyampaian Revisi Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain sebagai berikut :

1. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
2. Pemantauan Penegakkan Integritas dan Nilai Etika
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas :

| No | Nama<br>Proses Bisnis                                                      | Jumlah<br>Pengendalian | Frekuensi<br>Pemantauan |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak di KPP                                  | 4                      | Bulanan                 |
| 2  | Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP                        | 5                      | Bulanan                 |
| 3  | Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di KPP                             | 2                      | Bulanan                 |
| 4  | Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa di Kanwil DJP, KPP, dan UPT | 4                      | Bulanan                 |
| 5  | Penjaminan Kualitas Data dan Pembenahan Data MFWP di Kanwil DJP dan KPP    | 3                      | Bulanan                 |

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (LAKIN).

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mencapai 108,99%. KPP Pratama Kudus telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan, serta melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang, antara lain adalah :

1. Penyusunan rencana kerja dengan lebih cermat, sebagai panduan pelaksanaan tugas;
2. Penyusunan prognosa penerimaan pajak lebih presisi sehingga dapat memperhitungkan potensi sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Penggalan potensi melalui kegiatan PKM setiap fungsi (Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan, Edukasi Perpajakan dan Penegakan Hukum) lebih intensif dan diperluas ke sektor/wajib pajak yang belum tergali;
4. Perluasan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan lapor dan bayar;
5. Pelayanan tambahan berupa Helpdesk Coretax untuk mendukung implementasi Coretax sejak 1 Januari 2025;
6. Peningkatan softskill dan hardskill SDM melalui kegiatan kebintalan SDM untuk mendukung kinerja;
7. Penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan anggaran secara cermat, efektif dan efisien untuk mencapai output kinerja maksimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel baik bagi pimpinan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kudus, 20 Januari 2025  
Kepala KPP Pratama Kudus



Ditandatangani secara elektronik  
Mohamad Imroni

